

Pengaruh Nepotisme dalam Kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah terhadap Persepsi Masyarakat Banten

**Wulan Roma Tua¹, Bella Clara Roito², Tb.M.Ferdiansyah Suryana³,
Kartika Nuranisa Akbar⁴, Aisyah Azzahrah Rahmawati⁵, Agus Iryana⁶**

^{1 s.d 6}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

Email: romatuauanromatuapanjaitan@gmail.com¹, bellaclra27@gmail.com²
tb.m.ferdiansyah.s@gmail.com³, kartikanur4506@gmail.com⁴
aisyahazzhara1992@gmail.com⁵, agus.iryana@untirta.ac.id⁶

Abstrak

Nepotisme dalam pemerintahan menjadi sangat kontroversial karena berimplikasi pada kesejahteraan sosial dan persepsi masyarakat terhadap integritas pemerintah. Di Provinsi Banten, secara teori, praktik nepotisme akan memperburuk stratifikasi sosial yang ada karena jabatan atau tunjangan pemerintah diberikan atas dasar hubungan dan bukan berdasarkan prestasi. Hal ini berdampak pada ketimpangan kesempatan dan distribusi sumber daya, seperti kasus mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, yang diduga menggunakan hak politiknya untuk menunjuk anggota keluarga pada posisi penting di pemerintahan dan hal ini memicu persepsi negatif di kalangan pemerintah dan rakyat. Pemerintahan Banten dipimpin oleh sistem pelayanan sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari nepotisme yang dilakukan pemerintah Banten dan relevansinya terhadap kesejahteraan sosial dan kepercayaan masyarakat dengan menggunakan metode kualitatif berupa survei dan wawancara mendalam. Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemahaman mengenai dampak nepotisme sistematis di tingkat lokal dan memberikan saran untuk perbaikan pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada rakyat.

Kata kunci: Nepotisme, Ratu Atut Chosiyah, Kepercayaan Publik

Pendahuluan

Nepotisme dalam sistem pemerintahan seperti itu sering dianggap sebagai isu yang kontroversial, terlebih lagi jika perdebatan tersebut juga melibatkan isu yang lebih luas seperti kesejahteraan sosial dan persepsi publik. Dalam kasus Indonesia, khususnya di Provinsi Banten, isu-isu ini masih sangat menarik untuk dikaji karena wilayah ini memiliki situasi politik dan sosial yang rumit. Konsep ini mengacu pada situasi di mana seseorang diberi jabatan atau manfaat atau keistimewaan dengan cara apa pun yang diberikan kepadanya tanpa memperhatikan jasanya, tetapi lebih didasarkan pada hubungan dengan keluarga atau kerabat pejabat yang menunjuknya. Kecenderungan ini terjadi di banyak cabang pemerintahan



dan dapat berdampak luas pada kualitas layanan publik dan keadilan sosial.

Sejalan dengan itu, Provinsi Banten secara umum dikenal sebagai salah satu provinsi dengan tingkat ketimpangan sosial yang sangat tinggi. Oleh karena itu, adanya praktik nepotisme yang menguntungkan dalam pemerintahan akan membahayakan alokasi sumber daya dan kesempatan yang adil bagi masyarakat tersebut. Sebagian besar ketimpangan ini, selain dapat meningkatkan kekuatan sosial ekonomi yang merugikan, juga dapat mengubah persepsi warga terhadap pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Ketika individu merasakan perlakuan yang tidak setara, mereka cenderung tidak percaya pada pemerintah dan merasa dikecualikan dari langkah-langkah kebijakan yang ada.

Nepotisme adalah praktik memberikan perlakuan istimewa kepada anggota keluarga atau kerabat dalam konteks pekerjaan atau posisi tertentu tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kemampuan mereka. Praktik ini meluas di berbagai budaya dan sektor, sering dikaitkan dengan favoritisme dan diskriminasi.

Nepotisme memiliki dampak serius terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Penempatan individu yang tidak kompeten di posisi strategis melemahkan kinerja institusi, menciptakan inefisiensi, dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, nepotisme sering kali terkait erat dengan korupsi, yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara. Dalam berbagai kasus, nepotisme memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, serta memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, terutama dalam sektor pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial. Indeks Persepsi Korupsi sering digunakan sebagai indikator tidak langsung untuk mengukur tingkat nepotisme dalam suatu negara.

Fenomena ini juga terlihat jelas di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten, di mana Ratu Atut Chosiyah sebagai pemimpin Dinasti Politik terlibat dalam kasus suap terkait sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak. Meskipun ia telah dipenjara, pengaruh dinasti politik ini tetap kuat. Keluarga Ratu Atut terus mempertahankan kekuasaan, seperti putranya

Andika Harzummy yang menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten. Selain itu, anggota keluarga lainnya seperti Andika Harzummy dan Airin Rachmi Diany dipandang sebagai kandidat potensial untuk posisi gubernur di masa depan.

Praktik nepotisme dalam dinasti politik ini tidak hanya memperkuat korupsi, tetapi juga memperburuk kemiskinan dan ketimpangan sosial di Banten. Hubungan erat antara penguasa dan pengusaha dalam dinasti ini menciptakan lingkungan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini dirancang untuk mengetahui bagaimana nepotisme di pemerintahan Banten mempengaruhi kesejahteraan sosial dan perspektif masyarakat serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana strategi lokal menyatu dengan kondisi lokal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menunjukkan kepada pihak-pihak terkait tentang cara dan sarana menuju pembentukan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam untuk menggali persepsi dan pandangan masyarakat terkait praktik nepotisme serta dampaknya terhadap kinerja pemerintahan di Banten, khususnya pada masa kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah. Metode wawancara mendalam dipilih untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan kaya akan konteks mengenai fenomena nepotisme, yang tidak dapat dijangkau dengan pendekatan kuantitatif saja. Responden dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti usia dan status sosial, yang relevan dengan tujuan penelitian.

Wawancara dilakukan dengan sejumlah warga lokal Banten, salah satunya adalah seorang ibu rumah tangga berusia 53 tahun yang tinggal di Pandeglang, Banten. Pemilihan responden ini bertujuan untuk memperoleh perspektif masyarakat lokal mengenai dampak nepotisme terhadap

kehidupan mereka sehari-hari serta pandangan mereka terhadap kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-struktural, yang memungkinkan pewawancara untuk menggali lebih dalam topik-topik yang relevan namun tetap memberikan kebebasan bagi responden untuk mengungkapkan pendapat mereka secara terbuka. Wawancara ini dirancang untuk menggali persepsi tentang praktik nepotisme, dampaknya terhadap pemerintahan dan pelayanan publik, serta pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 26 November 2024 dengan narasumber Ibu Dewi, seorang ibu rumah tangga yang berusia 53 tahun dari Pandeglang, Banten. Dalam penelitian ini kami mencoba menggali pandangannya tentang nepotisme dan dampaknya terhadap masyarakat. Ibu Dewi menyatakan bahwa praktik ini merupakan hal yang lumrah di Indonesia khususnya di Banten dimana para pejabatnya cenderung lebih memihak pada keluarga mereka sehingga masyarakat biasa tidak mempunyai kesempatan yang adil.

Lebih lanjut, Ibu Dewi menambahkan, “Kalau seperti ini terus malah bisa memberikan dampak negatif pada kepercayaan masyarakat ke pemerintah.” Ia memberi contoh seperti pencairan bansos yang sering kali tidak tepat sasaran. Bagi Ibu Dewi, kepemimpinan seperti Ratu Atut Chosiyah lebih ditujukan untuk keluarganya sendiri dibandingkan masyarakat umum. Berdasarkan tanggapan dari Ibu Dewi, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengeluaran anggaran publik menjadi salah satu penyebab penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kemudian Ibu Dewi memberikan usulan yang mungkin bisa dilakukan masyarakat untuk dapat memilih calon legislatif dengan bijak dan tepat agar dapat mensejahterakan rakyat. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemerintah untuk menciptakan keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan publik.

3. Analisis Data

Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Dewi memberikan perspektif yang mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap praktik nepotisme di Banten dan dampaknya terhadap kepercayaan publik serta kualitas pelayanan pemerintah. Dalam wawancara ini, Ibu Dewi mengungkapkan bahwa nepotisme dianggap sebagai praktik yang sangat umum terjadi di Banten, di mana pejabat lebih mengutamakan keluarga mereka dalam kebijakan dan penunjukan jabatan. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama terkait dengan distribusi bantuan sosial yang dianggap tidak merata.

Pandangan ini sejalan dengan temuan dari survei yang menunjukkan bahwa mayoritas responden merasakan dampak negatif dari nepotisme terhadap kinerja pemerintah dan kesejahteraan sosial. Wawancara ini juga mencerminkan keinginan masyarakat untuk melihat sistem yang lebih transparan, adil, dan berbasis pada meritokrasi, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap seleksi pejabat.

Hasil wawancara ini memberikan gambaran yang lebih kaya mengenai sikap masyarakat terhadap fenomena nepotisme dan memberikan saran praktis untuk perbaikan, seperti penguatan transparansi, akuntabilitas, serta reformasi sistem rekrutmen pejabat yang lebih berbasis pada kemampuan daripada hubungan keluarga.

Pembahasan/hasil

A. Pengaruh Nepotisme terhadap Kesejahteraan Sosial

Nepotisme yang dilakukan pada masa pemerintahan Ratu Atut Chosiyah di tingkat provinsi Banten sangat berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakatnya. Survei tersebut menunjukkan bahwa 96,2 persen responden setuju bahwa nepotisme berdampak negatif pada distribusi kekayaan dan layanan publik. Lebih lanjut, hal ini menunjukkan tingginya angka ketimpangan sosial pada periode tersebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten.

Penempatan kerabat pada posisi teratas tanpa mempertimbangkan kompetensi mengakibatkan efisiensi alokatif yang tidak tepat, ketimpangan

program sosial, dan meningkatnya disparitas kelas sosial ekonomi. Sebab, bisa jadi masyarakat akan mengalami kekalahan telak dalam pemerataan akses terhadap fasilitas umum dan perekonomian, sementara ada pihak tertentu yang mendapatkan perlakuan istimewa.

B. Pengaruh Nepotisme terhadap Kepercayaan Masyarakat

Nepotisme juga menjadi penyebab berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Bukti survei menunjukkan 57,7% responden tidak percaya terhadap pemerintah dengan Ratu Atut Chosiyah sebagai pemimpinya. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas, dimana pengangkatan sanak keluarga pada posisi strategis menimbulkan anggapan bahwa hal tersebut hanya mementingkan diri sendiri dibandingkan pelayanan publik.

Kepercayaan terhadap hal ini semakin memburuk setelah terungkapnya kasus korupsi rumah tangga yang melibatkan Ratu Atut, sehingga mengungkap bagaimana penyalahgunaan kekuasaan bersifat pribadi atau kelompok tertentu. Responden mengungkapkan bahwa hal ini juga berdampak pada kualitas kebijakan publik sehingga meningkatkan kesan negatif atau buruk terhadap efektivitas pemerintah.

C. Menganalisis Praktik Nepotisme Ratu Atut Chosiyah

Selama masa jabatannya, Ratu Atut Chosiyah mengangkat kerabatnya ke posisi penting dalam pemerintahan tanpa memperhatikan kompetensi yang diperlukan. Kasus-kasus tersebut melibatkan kerabat dalam kepemimpinan lembaga dan anggota DPRD. Praktik ini menyebabkan konflik kepentingan, menurunkan kualitas kebijakan, dan menciptakan ketimpangan kesejahteraan. Berdasarkan investigasi, 46,2% responden menyatakan bahwa program kesejahteraan yang diperkenalkan pada masa itu tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Reformasi pemerintahan di Banten sebaiknya mencakup langkah-langkah korektif untuk mengurangi dampak negatif nepotisme dengan membuat operasi pemerintahan lebih transparan dan akuntabel. Salah satu langkah penting adalah mereformasi sistem rekrutmen pejabat.

Pengangkatan pejabat harus didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi yang relevan dengan jabatan yang dipegang, bukan berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan pribadi. Hal ini akan memastikan bahwa posisi strategis diisi oleh orang-orang yang benar-benar kompeten.

Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dengan melakukan audit independen, di mana hasilnya dipublikasikan secara terbuka. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah dan memastikan anggaran serta sumber daya digunakan dengan tepat.

Selain itu, peningkatan kualitas pemilu dan efektivitas pemerintahan dapat dicapai dengan mengedukasi masyarakat tentang dampak nepotisme dan risiko memiliki pemimpin yang tidak kompeten. Kesadaran dan pendidikan publik memainkan peran penting dalam memerangi nepotisme.

Terakhir, penegakan hukum yang ketat dan tegas terhadap praktik nepotisme sangat penting. Setiap penyalahgunaan kekuasaan harus menghadapi tindakan hukum. Langkah ini dapat membantu menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan kredibel.

D.Rekomendasi untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

Kebijakan anti-nepotisme dengan pengangkatan pejabat yang transparan merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan profesional. Nepotisme, yang mengutamakan hubungan pribadi atau keluarga dalam proses pengangkatan pejabat, seringkali menjadi akar dari penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan dalam pemerintahan. Dalam konteks ini, kebijakan anti-nepotisme berfungsi sebagai upaya untuk menghindari adanya penyalahgunaan posisi oleh individu yang lebih mengutamakan ikatan pribadi daripada kemampuan dan integritas.

Salah satu aspek utama dari kebijakan ini adalah transparansi dalam proses seleksi dan pengangkatan pejabat. Proses yang transparan memungkinkan publik untuk melihat dan mengawasi bagaimana seseorang dipilih berdasarkan kualifikasi, kompetensi, serta integritasnya. Hal ini juga

memberi ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan mengidentifikasi potensi konflik kepentingan yang bisa merugikan kepentingan umum.

Pentingnya transparansi ini antara lain dapat dilihat dalam penerapan berbagai mekanisme yang jelas dan terbuka dalam rekrutmen pejabat, seperti publikasi persyaratan, penilaian berbasis kompetensi, dan pengumuman hasil seleksi secara terbuka. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam proses seleksi, misalnya melalui sistem penerimaan berbasis online, juga dapat mengurangi potensi intervensi yang tidak sah dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memantau jalannya proses seleksi.

Dengan adanya kebijakan anti-nepotisme yang didukung oleh pengangkatan pejabat yang transparan, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, yang berfokus pada pencapaian tujuan bersama dan pengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, mengurangi praktek korupsi, serta mendorong profesionalisme dalam pemerintahan.

E. Peningkatan Kepercayaan Publik

Dalam melaksanakan pemerintahan perlu kiranya meningkatkan dan menjaga rasa kepercayaan dalam masyarakat untuk menjaga integritas dan peran masyarakat terhadap mengawasi kinerja pemerintah. Dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dapat dilakukan dengan komunikasi yang aktif antar pemerintah dan masyarakat, mediasi yang mana saling mengoreksi kinerja.

Nepotisme di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan berakar dalam budaya kekerabatan serta sistem patronase. Salah satu pola nepotisme yang paling umum di Indonesia adalah pengangkatan pejabat dan staf berdasarkan hubungan keluarga atau kerabat, bukan berdasarkan kualifikasi atau kompetensi. Ragam jabatan strategis dalam pemerintahan diisi oleh anggota keluarga atau kerabat dekat pejabat politik. Penegakan hukum yang efektif dan kuat dapat menghalau praktik nepotisme.

Transparansi dalam proses administrasi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya nepotisme dan meningkatkan kepercayaan publik.

F. Penguatan Kesejahteraan Sosial

Konsekuensi dari dampak nepotisme di atas melemahkan fondasi pemerintah yang pada akhirnya akan berdampak pada pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Nepotisme menyebabkan banyak dampak pada kinerja pemerintah, tetapi kurangnya minat di antara para peneliti di kajian ini bisa menyebabkan dampak yang lebih besar dari yang dibayangkan.

Nepotisme membawa dampak yang buruk bagi perekonomian, penelitian yang kami kerjakan mengisyaratkan bahwa kebanyakan orang di Indonesia memandang nepotisme sebagai hal yang lumrah dan sering terjadi di lini masyarakat. Maka dari itu perlu reformasi distribusi sumber daya daerah yang mana untuk melihat potensi dari kinerja pemerintah. Dalam contoh kasus pemerintahan Ratu Atut terlihat bahwa minimnya distribusi sumber daya daerah yang mana hanya dikelola oleh beberapa pihak yang juga dalam hal ini menyebabkan ketidakadilan dan merusak kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Dari praktik Nepotisme di Banten yang dilakukan oleh Ratu Atut dapat kita simpulkan bahwa pemerintahan yang melakukan aksi nepotisme terhadap rakyat, merupakan cikal bakal kerusakan kesejahteraan masyarakat, dan buruknya ekonomi dari masyarakat itu yang mana pemerintah hanya menyalurkan distribusi sumber daya ke beberapa pihak dan tidak merata ke masyarakat dan dari nepotisme itu, terjadi yang namanya ketimpangan sosial yang membuat masyarakat menjadi sengsara dan menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Dalam menanggapi kasus tersebut perlu yang namanya reformasi birokrasi yang menjadi awal perubahan sistem pemerintahan yang awalnya jelek karena nepotisme ke sistem pemerintahan yang lebih baik yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk

melaksanakan reformasi, perlu nya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemerintah yang bersih dan pemerintah yang tidak melakukan nepotisme terhadap rakyat nya dan dalam praktek nya masyarakat diminta untuk selalu teliti dalam segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dan selalu memberikan masukan yang membangun untuk pemerintah.

Daftar Pustaka

- Widhyartono, W., Kuswanjono, A., & Munir, M. (n.d.). Pemikiran Kedaulatan Ekonomi Sukarno dan Aspek Hukum dalam Ekonomi Pancasila. *Melayu Law Journal*, Universitas Riau. Retrieved from <https://myl.ejournal.unri.ac.id/index.php/ml/article/view/7047>
- Kholikulovna, K. (2022). Korupsi adalah Kejahatan yang Berbahaya bagi Masyarakat. *Jurnal Internasional Eropa tentang Penelitian Multidisiplin dan Studi Manajemen*. <https://doi.org/10.55640/ejmrms-02-06-05>
- Gusman, D. (2024). The Strong Influence of Nepotism on Corruption on the Buying of Positions in the Reason of Government. *Journal of Law, Politics and Humanities*. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i3.352>
- Dwiwiana, A., & Susanto, T. (2020). Nepotisme dalam Pemerintahan: Dampaknya terhadap Kinerja Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 45-60. <https://doi.org/10.59259/ab.v4i1.160>
- Sugitanata, A. (2024). Dinamika Lemahnya Kritisime Masyarakat terhadap Nepotisme di Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 4(1). <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar/article/view/160>
- Saebani, B. A., & Mubarak, A. F. (2024). Nepotisme Politik Kekuasaan dan Upaya Pemecahannya. *Polhum Sovereignty Law and Diplomatic Politics*, 1(1). <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/PLSDP/article/view/851>
- Thapa, S. (2023). The Nepotism and Favouritism in Politics of South Asia. *Studies in Social Science & Humanities*. <https://doi.org/10.56397/sssh.2023.10.01>

- Perez-Alvarez, M., & Strulik, H. (2021). Nepotism, Human Capital and Economic Development. *Journal of Economic Behavior & Organization*. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.11.034>
- Dwi Martiningsih. (2018). Peran Masyarakat Madani Mewujudkan Clean Government Pemerintahan yang Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Retrieved from https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnal_pusaka/article/download/121/119
- Saebani, B. A., & Mubarak, A. F. (2024). Nepotisme Politik Kekuasaan dan Upaya Pemecahannya. Retrieved from <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/PLSDP/article/download/851/564/5065>
- Hasan, E. (n.d.). Paradigma Komunikasi Pemerintahan. Repository Universitas Terbuka. Retrieved from <https://repository.ut.ac.id/4232/1/IPEM4319-M1.pdf>
- Malik, A. (2018). Nepotisme Berdampak Buruk bagi Ekonomi, Tapi Banyak Orang Menganggapnya Enteng. *The Conversation*. Retrieved from <https://theconversation.com/nepotisme-berdampak-buruk-bagi-ekonomi-tapi-banyak-orang-menganggapnya-enteng-104575>
- Malik, A. (2015). Peluang dan Tantangan Undang-Undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis. *MJS Journal*, 21(1). Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/mjs/vol21/iss1/2/>